

**PENULISAN HUKUM
REKONSTRUKSI PENGUJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN OLEH KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA
(Analisa Faktor Kelemahan Pengujian
Perundang-Undangan di Mahkamah Agung)**

Oleh:
HOLLY MURIDI ZHAM-ZHAM
201510110311268



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PENULISAN HUKUM
REKONSTRUKSI PENGUJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN OLEH KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA
(Analisa Faktor Kelemahan Pengujian
Perundang-Undangan di Mahkamah Agung)**

Oleh:
HOLLY MURIDI ZHAM-ZHAM
201510110311268



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

**REKONSTRUKSI PENGAJUAN PERUNDANG - UNDANGAN OLEH
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA (ANALISA FAKTOR
KELEMAHAN PENGAJUAN PERUNDANG - UNDANGAN DI MAHKAMAH
AGUNG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
HOLLY MURIDI ZHAM-ZHAM
NIM: 201510110311268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2019

**PENULISAN HUKUM
REKONSTRUKSI PENGUJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN OLEH KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA
(Analisa Faktor Kelemahan Pengujian
Perundang-Undangan di Mahkamah Agung)**

Oleh:
HOLLY MURIDI ZHAM-ZHAM
201510110311268



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

**REKONSTRUKSI PENGAJUAN PERUNDANG - UNDANGAN OLEH
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA (ANALISA FAKTOR
KELEMAHAN PENGAJUAN PERUNDANG - UNDANGAN DI
MAHKAMAH AGUNG)**

Diajukan Oleh:

HOLLY MURIDI ZHAM-ZHAM

201510110311268

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

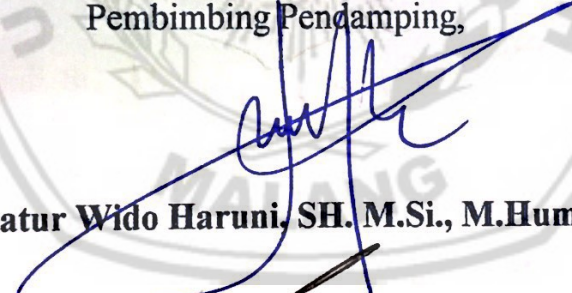
Pada, Rabu 16 Januari 2019

Pembimbing Utama,



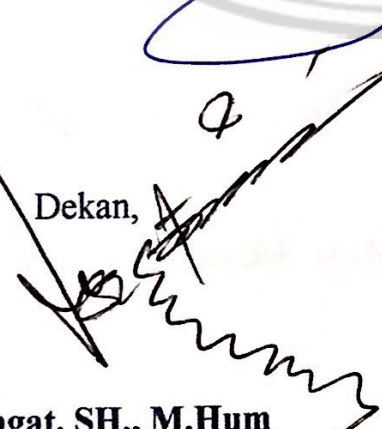
Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Pembimbing Pendamping,



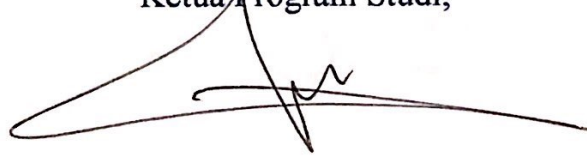
Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Dekan,



Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

HOLLY MURIDI ZHAM-ZHAM

201510110311268

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Januari 2019

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

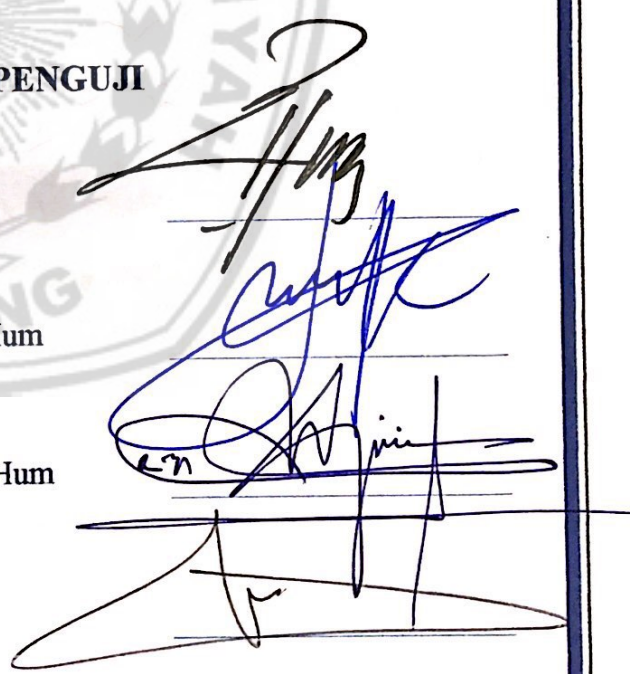
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Sekretaris : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HOLLY MURIDI ZHAM-ZHAM

NIM : 201510110311268

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

REKONSTRUKSI PENGAJUAN PERUNDANG - UNDANGAN OLEH
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA (ANALISA FAKTOR
KELEMAHAN PENGAJUAN PERUNDANG - UNDANGAN DI
MAHKAMAH AGUNG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Januari 2019



Holly Muridi Zham-Zham

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Holly Muridi Zham-Zham
Nim : 201510110311268
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:
**“REKONSTRUKSI PENGUJIAN PERUNDANG -
UNDANGAN OLEH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
INDONESIA (Analisa Faktor Kelemahan Pengujian
Perundang-Undangan di Mahkamah Agung)”** adalah
benar-benar karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir
Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik
disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik
sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis
dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan
dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini
dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya
bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN
dan diproses sesuai dengan ketentuan ketetapan hukum yang
berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber
pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON
EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagai mana mestinya.

Malang, Januari 2019
Yang menyatakan,

Holly Muridi Zham-Zham

MOTTO HIDUP

**“Niat dan kerja keras adalah jalan satu-satunya syarat menuju puncak
cita-cita yang diharapkan”**



Abstraksi

Nama : Holly Muridi Zham - Zham
NIM : 201510110311268
Judul : **Rekonstruksi Pengujian Perundang-Undangan oleh Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Analisa Kelemahan Pengujian Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung)**
Pembimbing : **Dr. Sulardi, SH., M.Si**
Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sistem Pengujian perundang-undangan yang dilakukan oleh MA menimbulkan kelemahan. Dalam tahap permohonan jumlah biaya permohonan tidak ditentukan, pada tahap pemaparan alasan pemohon, akan menyebabkan Majelis Hakim hanya melihat kebenaran dalam perspektif pemohon, sebab tidak adanya turut serta dengan pihak-pihak yang lain, dan tahap pemeriksaan permohonan yang dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak adanya pemanggilan oleh pihak lain, serta dalam tahap putusan terdapat cacat secara formil dan materiil pada putusannya. Maka dari itu, penulis akan membahas dua rumusan masalah yakni: Apa Saja Faktor yang Menyebabkan Lemahnya Sistem Perundang-Undangan di Mahkamah Agung Berserta Analisa Perbandingan dengan Pengujian yang berada di Mahkamah Konstitusi dan Bagaimana Rekonstruksi Sistem Pengujian Perundang-Undangan yang Terpadu Terintegrasi dan berada di Satu Atas Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*), dikaji dengan menggunakan 3 (tiga) metode yakni : pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berdasarkan perundang-undangan dan sekunder berdasarkan buku, dan jurnal. Sehingga rekonstruksi terhadap Pengujian Perundang-Undangan merupakan upaya untuk memperbaiki mekanisme maupun tahapan dalam proses pengujian perundang-undangan. kesimpulannya yang direkonstruksi berupa pengujian perundang-undangan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi supaya Terpadu Terintegrasi dan fokus dalam pengujian perundang-undangan. Terdapat dua rekomendasi, yakni: Pertama, untuk jangka pendek melakukan revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji seluruh perundang-undangan melalui amandemen ke V UUD NRI 1945

Kata Kunci : **Pengujian Perundang-Undangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.**

Abstract

Name : Holly Muridi Zham - Zham
NIM : 201510110311268
**Title : Reconstruction of Regulation Review by Judicial Power
In Indonesia (Analysis of Weaknesses in Regulation
Review by the Supreme of Court)**
**Advisor : Dr. Sulardi, SH., M.Si
Catur Widodo Haruni, SH., M.Si., M.Hum**

The system for reviewing regulation that is carried out by the Supreme of Court has some weaknesses. In the adjudication stage, the amount of the application fee that is not determined at the stage of the applicant's justification reading will cause the Panel of Judges to only see the truth in the applicant's perspective, because there is no involvement of other parties, and the examination phase of the application in the shortest possible time is in accordance with the principle of justice that is simple, fast, and low cost, there is no request the presence by other parties, and there are formal and material defects in the decision at the decision stage. Therefore, the researcher will discuss two research problem, namely: The Factors That Cause the Weakening of the Regulation System in the Supreme of Court and the Comparative Analysis with Reviewing in the Constitutional Court and How the Reconstruction of Integrated Regulation Review System is in One Roof the Constitutional Court. The research method used in this study was a type of normative legal research, the data was analyzed using 3 methods, namely: statute approach, conceptual approach and comparative approach. Additionally, legal materials used were primary legal material based on legislation and secondary material based on books, and journals. Therefore, the reconstruction of Regulation Review was an attempt to renew the mechanism and stages in the process of reviewing the regulation. In conclusion, the reconstruction was in the form of reviewing regulation carried out by the Constitutional Court so that it was integrated and focused on reviewing the regulation. There were two recommendations, namely: First, as a short-term recommendation, it was essential to revise the Judicial Power Act and reinforce the authority of the Constitutional Court to examine all regulation through the fifth amendment of UUD NRI 1945.

Keywords: Regulation Review, Supreme of Court, Constitutional Court.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin Maha besar Allah SWT, Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Rekonstruksi Pengujian Perundang-Undangan Oleh Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Analisa Faktor Kelemahan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Agung)”**. Sholawat dan Salam tercurahkan baginda Rosulullah SAW yang selalu penulis rindukan, beliau sebagai suri tauladan contoh kehidupan bagi umat muslim. hingga sampai saat ini juga, penulis bisa merasakan indahnya islam dan manisnya iman.

Proses menyelesaikan tugas akhir ini mengajarkan penulis tentang banyak hal, yakni sebuah perjuangan, mimpi, awal masa depan Penulis, persembahan karya oleh Penulis yang terindah bagi keluarga besar Penulis dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan. Menyelesaikan tugas akhir ini adalah hal yang membanggakan bagi penulis, karena menjadi pertanggung jawaban penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Drs. Muridi, SH, M.Si, selaku ayah tercinta, yang telah mendidik dan membimbing Penulis dalam menjalani lika-liku kehidupan dan arah masa depan yang cerah dengan dibangun menggunakan hati dan ketulusan. Kemudian kepada zunaida, selaku ibu tersayang, yang telah menjadikan Penulis sebagai sosok yang kuat, mandiri dan berani dalam menjalani kehidupan. Kepada Lelly, selaku adik, kembaran dan partner kehidupan. Kepada kakek dan nenek, yang telah merawat dan mencintai Penulis sejak kecil dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kepada DR. Musnaini, SE, MM atau Mommy, yang telah mengajarkan Penulis menjadi pribadi yang baik, dan beriman kepada Allah SWT. Kepada kakak, dan keluarga besar bapak Mursid, yang telah memberikan support secara materil dan immateril dari awal kuliah hingga detik ini. Seluruh Prestasi yang di peroleh saat bangku perkuliahan, penulis persembahkan untuk keluarga;
2. Dr. Drs. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor UMM, yang menjadi motivator dan inspirator penulis seama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya. Semoga dapat membawa UMM menjadi lebih baik;
3. KH. Tamim Irsyad (Alm), KH. Cholil (Alm), selaku Pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum, KH. Cholil Dahlan, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum, yang telah berjuang mendirikan dan meletakkan nilai-nilai dasar, prinsip untuk pondok, sehingga penulis bisa menerima nilai-nilai yang ditanamkan tersebut, dan bermanfaat dalam kehidupan penulis sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan;

4. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, selaku mantan Rektor UMM yang mengukuhkan penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum UMM pada tahun 2015. Penulis bangga pernah dipimpin bapak di kampus putih, semoga amanah dengan tugas yang baru sebagai Menteri Pendidikan RI;
5. Dr. Sulardi, SH., M. Si selaku dosen pembimbing penulis dan Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis sekaligus Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah sabar dan penuh ketulusan dalam memberikan arahan serta pengetahuan baru pada penulis;
6. Said Noor Prasetyo, SH, MH, selaku dosen wali yang selalu mensupport Penulis, baik dalam proses mengerjakan skripsi maupun saat Penulis mengikuti kompetisi-kompetisi baik nasional maupun regional pada saat proses belajar Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Dr. Haris, S.H.,M.Hum (Pembantu Dekan II), Said Noor P, S.H.,M.H (Pembantu Dekan III), terimakasih telah menjadi motivator penulis;
8. Bapak dan ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan teman berkarir selama Penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

9. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
10. Febriansyah Ramadhan, SH, selaku kawan yang telah membimbing Penulis dalam berbagai kompetisi nasional dan regional yang dilewati oleh Penulis, mas Febri adalah sosok yang sangat berharga bagi Penulis yang akan selalu terkenang selama hidup Penulis, sosok yang selalu meminjami buku Penulis saat proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis sadari, bahwa selama belajar Penulis banyak sekali merepotkan dan menyita banyak waktu mas Febri sehingga Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya;
11. Kawan-kawan se-Ideologi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Alumni anggota Lembaga Semi Otonom Judicial Watch (LSO JW) Periode 2017, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Universitas Muhammadiyah Malang (BPPU) Periode 2018, keluarga Komunitas Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (KRD FH UMM), dalam hal ini yakni Febriansyah Ramadhan, SH, Gurnita Ning Kusumawati, SH, Anita Diar Farukhi, SH, Fitriana Kasiani, SH, Maulana Malik Ibrahim, SH, Asri Rezki Saputra, Ratu Julhijah, dan Wildan Arif, serta teman-kawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis, yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa, dan telah Penulis sadari, bahwa selama menimba ilmu banyak sekali kesalahan yang penulis perbuat, dan

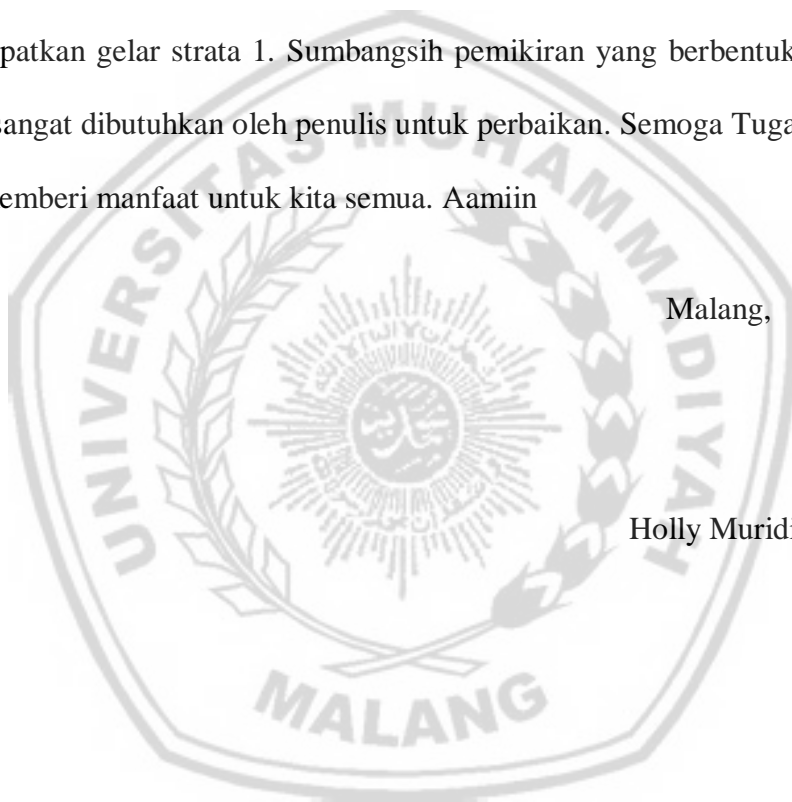
tidak optimalnya dalam menjalankan amanah, sehingga Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya;

12. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2015 serta teman-teman kelas E, penulis bangga pernah belajar dan berjuang bersama kalian.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk diuji dihadapan penguji untuk mendapatkan gelar strata 1. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Aamiin

Malang, Januari 2019

Holly Muridi Zham-Zham



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian	15
F. Metode Penulisan.....	15
1. Metode Pendekatan	15
2. Jenis Bahan Hukum.....	16
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
4. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	17
5. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum.....	20
1. Konsep Negara Hukum	20
2. Tipe-Tipe Negara Hukum	22
3. Unsur-Unsur Negara Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pengujian Perundang-Undangan.....	25
1. Model Pengujian Perundang-Undangan.....	28
2. Jenis-Jenis Pengujian Perundang-Undangan.....	30
3. Perbandingan Hukum Tata Negara dalam hal Pengujian perundang-undangan	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	37
1. Mahkamah Agung.....	37
2. Mahkamah Konstitusi	46
D. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

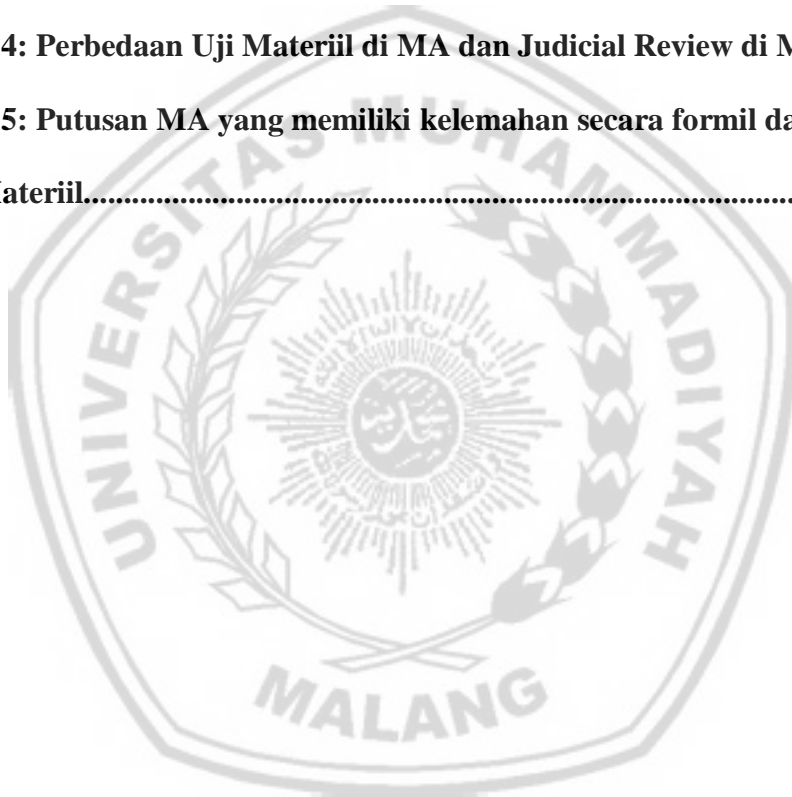
A. Faktor Penyebab Lemahnya Uji Materiil di Mahkamah Agung.....	58
1. Kondisi Saat Ini dan Implikasi Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang Mengalami Disharmonis.....	67
B. Regulasi Pengujian Perundang-Undang Sebagai <i>Ius Constituendum</i> ...	74
1. Pengujian perundang - undangan berada pada satu atap di Berbagai Negara.....	74
2. Analisa Terhadap Regulasi Pengujian perundang - undangan berada pada satu atap di Berbagai Negara.....	78

C. Rekonstruksi tentang Pengujian perundang - undangan berada pada satu atap di Mahkamah Konstitusi.....	85
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	xvii
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Putusan MA dan MK yang mengalami disharmonis.....	5
Tabel 2: Negara yang Memiliki Komisi Yudisial Ganda.....	32
Tabel 3: Struktur Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 dan Perubahannya.....	38
Tabel 4: Perbedaan Uji Materiil di MA dan Judicial Review di MK.....	39
Tabel 5: Putusan MA yang memiliki kelemahan secara formil dan Materiil.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas

Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3 : Berita Acara Sempro



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang - Undang (Legisprudence)*. Jakarta, Prenamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- _____. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia.
- _____. 2004. *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. Jakarta. ELSAM.
- _____. 2014. *Prihal Undang-Undang*, Rajawali Press. Jakarta.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia - Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta, UI Press.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar - dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia.
- Djohansjah, J. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta, KBI.
- Fatkhuroman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. 2004. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta, FH UII Press.
- _____. 2007. *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta.
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang - Undangan Di Indonesia*. Bandung, PT. Alumni.
- Mahfud MD. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Saleh, Wantjik. 1966 - 1973. *Perkembangan Perundang - Undangan*, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1998, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail Suny, 1981. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta. Aksara Baru.
- Syahrizal, Ahmad 2006. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta, Pradnya Paramita.

Jurnal, Makalah, dan Penelitian

- Adji, Oemar Seno. 1966. "*Prasaran*" dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945 di Jakarta
- Budiman, Arief. *Negara, Kelas dan Formasi Sosial*, (wawancara) dalam majalah Keadilan, No. 1 Tahun XII/1985.hlm. 39
- E.C.S. Wade dan G. Gogfrey, *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Citizen and the Including Central and Local Government, the Xitizen and the state and Administrative Law*, 7th Edition, Longmans, London, 1965, Hlm. 50-51
- Harian Kompas.1998. "*Kemandirian Hakim Dimulai dari Memandirikan MA*"
- Komisi Hukum Nasional, "*Kajian Terhadap Amandemen UUD 1945*", Bahan Panduan (Analisis Kuantitatif) Diskusi Kelompok Terarah "Pertemuan Ahli" Penelitian KHN RI Tahun 2009, Jakarta, 18 - 19 November 2009, Hlm. 25 - 26
- Manan, Bagir. 2007. *Pembaharuan Lembaga - Lembaga Negara dalam UUD 1945-Baru*, Makalah yang disampaikan sebagai ceramah di hadapan civitas akademika Universitas Sam Ratulangi di Manado.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) sebagai Upaya Hukum Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara : Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Rujukan Amerika Serikat, Republik Federal Jerman dan Korea Selatan sebagai Perbandingan*.
- Sekretariat Negara RI. 1993. *Materi Pokok Pendidikan Pancasila*, Jakarta, Hlm. 305-306

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 31 ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Pasal 51 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Pasal UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan - Badan Kehakiman dan Kejaksaan
- Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 24A ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 24C ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
- Putusan MA No. 154/HUM/2009 tentang Pengujian Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2009 dan Peraturan KPU No. 259 Tahun 2009 terhadap UU No. 10 Tahun 2008. Putusan MK No. 110 -111-112-113/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 23

Yulida Medistiara, *Mahfud Md Nilai Gugatan OSO yang Dikabulkan MA Tidak Wajar*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/4291277/mahfud-md-nilai-gugatan-oso-yang-dikabulkan-ma-tidak-wajar>, pada 18 Desember 2018.

Reza Jurnaliston, *bertentangan dengan MK, Putusan MA soal OSO Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/06042201/bertentangan-dengan-mk-putusan-ma-soal-oso-bisa-timbulkan-ketidakpastian>, pada 18 Desember 2018

Ahsan Yunus, Skripsi: “*Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*” (Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2011), Hlm. 43-46

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Buku Agung, Hlm. 87

Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009. Hlm. 84

Permenkumham 32 Tahun 2017

Legal era.id, *Problematisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017*, <https://legaleraindonesia.com/problematisasi-peraturan-menteri-hukum-dan-ham-nomor-32-tahun-2017/>, pada 28 Desember 2018

Kranenburg, *Inleiding in de Vergelijkende Staats-rechtswetenschap*, Harleem 1950. Hlm. 2

Sri Soemantri, *Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1971, Hlm. 5

Esin Orucu, *Critical Comparative Law, Considering Paradoxes for Legal Systems in Transition*, dalam *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol. 4.1, Juni 2000, Hlm. 74

Ibid, Esin Orucu, *Critical Comparative Law, Considering Paradoxes for Legal Systems in Transition*, Hlm. 80

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981. Hlm. 434

Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1978, Hlm. 128

Mary Ann Glendon, Michael Wallace Gordon, Christoper Osakwe, *Comparative Legal Traditions in A Nutshell*, West Publishing Cp.St.Paul Minn, 1982, Hlm. 4, yang membagi tujuan perbandingan hukum ada tiga, yakni tujuan professional (bagi hakim dan pembuat UU), tujuan ilmu pengetahuan, serta tujuan budaya

Sundari, 2014, *Perbandingan Hukum dan Fenomena Adopsi Hukum*, Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm. 13

naskah akademik rancangan UUD NRI 1945 dalam upaya perubahan kelima UUD NRI 1945, Hlm.124-157

John Z. Loude, *Menemukan hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1985), Hlm. 82

John. H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff, *Modern Constitutional Theory*, third Edition (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1994), Hlm. 94-96.

Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2005), Hlm. 16.

Michael Allen dan Brian Thompson, *Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law* (United Kingdom: Oxford University Press, 2002), Hlm. 568

Sri Soemantri, M., *Hak Menguji Material di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), Hlm. 5

RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya UUD 1945* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), Hlm. 389.

Todung Mulya Lubis, *Judicial Review dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, dalam Beny K Harman dan Hendardi (edt), *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review* (Jakarta: Penerbit YLBHI dan JARIM, 1991), Hlm. 106.

Harun Alrasid, *Hak Menguji dalam Teori dan Praktik*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, Juli 2004 (Jakarta: Penerbit Mahkamah Konstitusi RI, 2004), Hlm. 94

Nanang Sri Darmadi, “*Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*,” Jurnal Hukum Vol. XXVI No. 2 (2011), hlm. 668.

Diana Kusumasari, “*Perbedaan Judicial Review dengan Hak Uji Materiil*” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4257/perbedaan-judicial-review-dengan-hak-uji-materiil>, diakses 20 Desember 2018

Bachtiar, *Problema Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), Hlm. 120.

Hans Kelsen, “*Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the American Constitution*”, *Journal of Politics* Vol. 4 (1942), Hlm. 183-200

Christoph Bezemek, “*A Kelsenian Model of Constitutional Adjudication: The Austrian Constitutional Court*”, *Zeitschrift fur offentliches Recht* Vol. 67 (2012), Hlm. 115-128

Lech Garlicki, “*Constitutional Courts versus Supreme Courts*”, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 5 No. 1 (2007), Hlm. 44-68.

Gerhard Dannemann, “*Constitutional Complaints: The European Perspective*”, *The International and Comparative Law Quarterly* Vol. 43 (1994), Hlm. 142-153